

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia internasional saat ini tengah menghadapi tantangan besar berupa meningkatnya ketegangan geopolitik, salah satunya konflik Rusia dan Ukraina yang semakin intens setelah invasi militer Rusia pada 24 Februari 2022. Invasi ini telah menjadi sorotan global karena dampaknya tak hanya terbatas pada stabilitas kawasan Eropa Timur, tetapi juga menandai perubahan mendasar dalam distribusi kekuasaan dan keamanan dunia (Pratiwi, 2023). Perang di Ukraina telah secara signifikan mengubah prioritas kebijakan luar negeri Kremlin dan mendorong negara-negara Barat untuk berusaha mengisolasi Rusia. Hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia memburuk secara signifikan semenjak Februari 2022. Para pemimpin Eropa, bersama dengan negara-negara demokratis besar lainnya juga mengecam Rusia atas tindakan agresi yang tidak beralasan terhadap Ukraina (Stent, 2025).

Banyak negara akhirnya memberlakukan sanksi ke Rusia dan berdampak terhadap kondisi politik dan ekonomi mereka. Meskipun sanksi ekonomi yang dikenakan pada Rusia telah memiliki dampak yang terukur, sanksi tersebut belum cukup untuk mengurangi kemampuan Rusia yang telah berhasil menimbulkan kerusakan luas pada infrastruktur dan kehidupan sipil warga Ukraina. Di luar sengketa teritorial, perang ini telah menjadi simbol perjuangan geopolitik dan ideologis yang lebih luas. Bagi negara-negara Barat, konflik ini merupakan

tantangan yang lebih dalam yang dihadapi pada abad ke-21 karena isunya yang kompleks, terus berkembang, dan sulit diatasi dengan solusi sederhana (Aroshidze, 2025).

Rusia dan Ukraina telah lama memiliki hubungan budaya dan sejarah yang erat dan semakin berkembang seiring waktu. Hubungan ini disebabkan oleh posisi geografis mereka yang berdekatan serta hubungan perdagangan yang saling ketergantungan. Namun, Ukraina dalam sejarah modern telah lama dianggap sebagai negara independen merdeka yang memiliki sistem politik terpisah dari Rusia (Lichterman, 2022). Sejak lama Rusia ingin memasukkan Ukraina ke dalam wilayahnya karena sejumlah alasan geopolitik. Kedua negara memiliki sejarah budaya yang sama meskipun memiliki sistem politik yang berbeda. Sebagian besar alasan potensi aneksasi berkaitan dengan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas yang terdapat di Ukraina, yang memasok sebagian besar konsumen di Uni Eropa. Invasi terhadap Ukraina secara strategis dapat menguntungkan bagi Rusia, yang bukan anggota Uni Eropa. Alasan lain dari invasi tersebut adalah untuk meningkatkan pengaruh Rusia di mata Internasional karena fokus dunia saat ini terpusat pada China dan Amerika Serikat (Ratten, 2023).

Perang Rusia-Ukraina dimulai pada Februari 2014 dengan invasi rahasia ke Republik Otonom Krimea Ukraina oleh pasukan Rusia yang menyamar. Konflik ini meluas pada April 2014 ketika pasukan Rusia dan pasukan proksi lokal merebut wilayah di wilayah Donbas Ukraina (Ray & Britannica, 2025). Akibat invasi ini, Rusia mendapat kecaman yang luas dari dunia internasional atas invasi mereka, yang berakibat pada pemberlakuan sanksi (seperti pembekuan aset dan larangan

perjalanan) terhadap Rusia, penangguhan keanggotaan Rusia di G8, dan memberikan bantuan politik dan keuangan kepada Ukraina (Anthony et al., 2015). Selama dua dekade sejak kepemimpinan Putin, kebijakan luar negerinya hampir selalu didasari oleh penolakan yang semakin besar terhadap tatanan global yang dipimpin Amerika Serikat. Pergeseran semakin jelas dalam pidatonya di Munich pada 2007, ketika ia mengecam hegemoni Barat dan menuntut pengakuan atas “lingkup pengaruh” Rusia (Ratten, 2023). Semenjak invasi 2014 dan beralihnya era dari Obama ke Trump, Rusia menerima lebih banyak sanksi dan terjadi keruntuhan perjanjian nuklir, yang membuat Kremlin frustrasi. Saat COVID-19 melanda, Putin semakin terisolasi. Terisolasi dan fokus pada “kesalahan” historis, ia beralih dari manuver diplomatik ke obsesi dengan “takdir imperial” Rusia.

Karir politik Putin sendiri dimulai sejak tahun 1990 ketika ia ditunjuk sebagai penasihat hubungan internasional walikota Saint Petersburg, Anatoly Sobchak. Pada tahun 1996, Sobchak kalah dalam pemilihan walikota dan selanjutnya Putin dipanggil ke Moskow untuk menjadi Wakil Kepala Departemen Pengelolaan Kekayaan Negara. Kemudian pada tahun 1997, Putin ditunjuk sebagai wakil ketua staf Presiden Boris Yeltsin. Vladimir Putin naik ke puncak kekuasaan pada akhir 1999 ketika Boris Yeltsin secara tiba-tiba mengundurkan diri dan menunjuknya sebagai Presiden Sementara. Pada saat itu, Rusia masih berjuang menghadapi dampak krisis keuangan 1998, yang ditandai dengan ketidakstabilan ekonomi, institusi yang lemah, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Prioritas utama Putin adalah memulihkan ketertiban dan mengkonsolidasikan kekuasaan dengan cara memperkuat penegakan hukum, membatasi pengaruh oligarki, dan meluncurkan kampanye militer baru di

Chechnya, menggambarkan kelangsungan Rusia sebagai perjuangan melawan separatisme internal dan campur tangan eksternal. Di bidang kebijakan luar negeri, Putin mengemukakan pandangan dunia yang mengkritik dominasi AS dan pembentukan ulang tatanan global oleh “pemenang” Perang Dingin. Ia memperingatkan tentang dukungan Barat terhadap gerakan separatistis dan khawatir Rusia akan terpecah menjadi “kelas kedua atau ketiga” negara-negara. Namun, meskipun ada kecurigaan ini, ia awalnya mengejar kerja sama dengan Barat, terutama setelah 9/11, ketika Rusia terlibat dalam kolaborasi kontra-terorisme dan bergabung dengan Dewan NATO-Rusia pada 2002. Pendekatan skeptis terhadap niat AS ini merupakan langkah pragmatis Putin dalam mencari kemitraan terbatas, serta menjadi dasar bagi sikap konfrontatif yang akan diadopsi Rusia pada tahun-tahun berikutnya (Bugayova, 2019).

Sejak menjabat, Vladimir Putin menjalankan kebijakan luar negeri yang reaktif terhadap ancaman strategis, mengutamakan pengujian kekuatan lawan dan fleksibilitas taktis. Prinsip-prinsip ini membimbing keputusan kebijakan luar negeri Putin dengan strategi yang mencakup gangguan pada lembaga internasional, operasi siber, hingga tindakan militer kinetik, dengan mengabaikan hukum internasional maupun opini publik yang biasanya dipegang pemimpin Barat (Recorded Future, 2025). Salah satu keputusan ekstrim yang diambil Putin menanggapi ancaman strategis terhadap Rusia adalah upaya mengambil alih beberapa wilayah Ukraina. Pada awal 2000-an, Putin mengekspresikan optimisme tentang masa depan Rusia yang berorientasi Eropa dan bahkan mengakui hak Ukraina untuk mengejar keanggotaan NATO, melihat potensi keanggotaan Ukraina di UE sebagai faktor positif bagi stabilitas internasional. Namun, seiring dengan

munculnya “revolusi warna” dan perluasan NATO ke timur yang mulai menantang pengaruh Rusia, retorikanya mengeras menjadi keyakinan bahwa campur tangan Barat secara aktif mengancam keamanan dan ikatan budaya Rusia.

Jika ditarik ke belakang, campur tangan Vladimir Putin terhadap Ukraina dapat ditelusuri kembali ke Revolusi Oranye 2004, ketika rakyat Ukraina bangkit menentang pemilihan umum yang dicurangi dan menolak campur tangan Moskow. Dukungan terbuka Putin terhadap Viktor Yanukovych dianggap sebagai serangan langsung terhadap kedaulatan Ukraina, dan protes massal yang mengikuti menandai titik balik dalam pergeseran Ukraina menjauh dari Rusia. Revolusi Oranye memperkuat ketakutan Putin terhadap penyebaran demokrasi, mendorongnya untuk memperluas kampanye disinformasi dan narasi simbolis untuk melawan pengaruh Barat. Trauma pribadi yang dialaminya akibat menyaksikan runtuhnya Uni Soviet sebagai anggota KGB membentuk pandangannya tentang dunia, meyakinkannya bahwa pemberontakan harus ditumpas untuk menjaga identitas Rusia. Pada akhirnya, artikel ini menyimpulkan bahwa Putin memandang penghancuran kedaulatan Ukraina sebagai misi historisnya, dan bahwa perdamaian tidak dapat dicapai melalui kompromi, karena ia akan terus berjuang hingga kemerdekaan Ukraina menjadi tak terbantahkan (Dickinson, 2025).

Sejak aneksasi Krimea pada 2014, Putin beralih dari memandang Ukraina sebagai mitra berdaulat menjadi medan pertempuran geopolitik kritis, di mana ia membenarkan intervensi militer dan operasi siber sebagai upaya mencegah Rusia kehilangan lingkup pengaruh tradisionalnya. Meski ambisi ekspansi teritorialnya tetap ada, keputusan Putin untuk melakukan tindakan berisiko tinggi di masa depan,

termasuk terhadap wilayah NATO, akan sangat bergantung pada penilaiannya terhadap kesiapan militer Rusia serta ketegasan respons Barat (Russia Matters, 2022).

Dalam esainya yang dirilis pada tahun 2021 yang berjudul “*On the Historical Unity of Russians and Ukrainians*”, Vladimir Putin menggambarkan konflik 2014 di Donbas sebagai perjuangan pertahanan melawan proyek “anti-Rusia” yang didukung oleh Barat. Ia berargumen bahwa Donbas adalah wilayah yang berdasarkan sejarah adalah milik Rusia, namun secara artifisial “dipaksakan” ke Ukraina melalui keputusan administratif Bolshevik pada tahun 1920-an. Dari perspektif Putin, Revolusi Euromaidan adalah kudeta negara yang tidak sah yang dipimpin oleh nasionalis radikal, yang memaksa penduduk Donbas untuk mengambil senjata untuk melindungi bahasa dan budayanya dari “asimilasi paksa.” Akhirnya, ia menggambarkan konflik ini sebagai akibat dari penolakan Kyiv untuk menghormati Perjanjian Minsk dan pilihannya untuk bertindak sebagai alat geopolitik Barat, dengan menegaskan bahwa Ukraina hanya dapat mencapai kedaulatan sejati melalui kemitraan dan persatuan dengan Rusia (Putin, 2021). Tindakan agresif ini bukan sekadar ekspansi teritorial atau strategi militer belaka, melainkan mencerminkan kalkulasi strategis yang dalam, berakar pada dinamika kepemimpinan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Pada akhir 2021, terjadi peningkatan militer besar-besaran dan ultimatum kepada NATO, yang menjadi pemicu invasi skala penuh pada 2022.

Pada 24 Februari 2022, Rusia menginvasi Ukraina dan hal ini merupakan eskalasi besar-besaran dari Perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada tahun 2014.

Rusia melakukan serangan besar-besaran dan serentak di berbagai wilayah di Ukraina. Serangan ini menyebabkan krisis pengungsi terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II, korban jiwa yang massif, dan gangguan ekonomi global, meskipun Rusia awalnya mengharapkan kemenangan cepat. Tujuan yang dinyatakan Rusia termasuk “demiliterisasi dan denazifikasi” Ukraina, sementara komunitas internasional secara luas mengecam tindakan yang tidak provokatif tersebut dengan sanksi berat terhadap Rusia. Perlawanan Ukraina, yang didukung oleh bantuan Barat, berhasil menahan serangan awal menuju Kyiv, memindahkan fokus konflik ke Ukraina timur dan selatan, di mana pertempuran intensif terus berlanjut (Center for Preventive Action, 2025). Dengan demikian, Rusia telah melakukan dua serangan militer terhadap Ukraina, yaitu pada 2014 dan 2022, di mana yang terakhir disebut sebagai “Operasi Militer Khusus”.

Menurut Dylan et al (2023), invasi Rusia ke Ukraina menunjukkan kegagalan intelijen strategis, yang sebagian disebabkan Putin lebih memanfaatkan sistem intelijen untuk mengelola dominasi internal dan mengkonfirmasi biasanya, daripada mendapatkan informasi objektif dari negara lain. Hal ini sejalan dengan kecenderungan pemimpin otoriter yang berfokus pada kekuasaan, bukan pada dialog atau validasi eksternal. Model kepemimpinan kontingensi menjelaskan bahwa pemimpin seperti Putin berbasis pada orientasi tugas (*task-oriented*), mengutamakan pencapaian tujuan strategis seperti stabilitas rezim, kekuatan militer, dan pemulihan kehormatan nasional atas hubungan interpersonal atau keanekaragaman pendapat (Penn State, 2022). Dalam konteks invasi, ini tercermin dari pengambilan keputusan cepat, sepihak, dan dengan kerangka pemikiran hitam putih, tanpa partisipasi publik yang berarti.

Selain faktor kode operasional, aspek emosional juga memainkan peran penting dalam invasi ke Ukraina. Putin menunjukkan tanda nostalgia yang kuat terhadap dominasi Uni Soviet dan frustrasi terhadap ekspansi NATO ke Eropa Timur, yang dianggap sebagai penghinaan terhadap kebesaran Rusia (Soodavar, 2022). Studi McGlynn (2023) dari *Memory Makers* menyoroti penggunaan propaganda nostalgia Soviet secara sengaja oleh rezim Putin, yang mampu membentuk identitas nasional dengan menyebarkan narasi sejarah emosional melalui media dan pendidikan. Temuan ini menunjukkan bagaimana nostalgia digunakan untuk ‘melegitimasi’ invasi Ukraina sebagai bagian dari perebutan kembali sesuatu yang dianggap hilang, sesuai apa yang disampaikan Putin dalam esainya.

Sejumlah studi terdahulu yang mengangkat tema serupa mengenai isu ini, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Putri Diah Wahyuningtias dan Prihandono Wibowo (2023), yang mengungkap bahwa keputusan Rusia untuk melakukan invasi dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa kekhawatiran terhadap ekspansi NATO dan ketergantungan Ukraina pada energi, serta faktor internal seperti dukungan politik dalam negeri terhadap Putin dan kekuatan militer yang dimiliki Rusia. Penelitian ini belum mengkaji secara mendalam bagaimana faktor psikologis individu Vladimir Putin membentuk proses pengambilan keputusan invasi, sehingga analisis masih menempatkan negara sebagai aktor rasional tanpa mempertimbangkan peran kepemimpinan personal secara komprehensif. Pada penelitian lain, Ben Soodavar dari King’s College London (2022) menyoroti bahwa keputusan Putin untuk mengambil langkah ekstrem, meskipun disertai risiko kerugian ekonomi besar, dilandasi oleh dorongan kuat untuk menghindari

kehilangan reputasi nasional dan dominasi geopolitik. Dalam pandangannya, invasi merupakan langkah yang sepadan guna menjaga status dan prestise Rusia di mata dunia. Penelitian ini belum menelusuri bagaimana faktor psikologis personal Putin, seperti nostalgia historis, kebutuhan akan pengakuan, pola kepemimpinan otoriter, serta kecenderungan pengambilan keputusan berbasis emosi dan persepsi subjektif, berkontribusi dalam membentuk preferensi kebijakan luar negeri Rusia.

Selanjutnya, Theisen dan rekan-rekannya (2024) menunjukkan bahwa sebelum pecahnya invasi besar-besaran, terjadi lonjakan drastis dalam penyebaran konten pro-Rusia di Telegram tercatat peningkatan sebanyak 8.900% dalam jumlah unggahan dan 5.300% pada konten gambar yang menandakan adanya penggunaan propaganda visual secara masif untuk membentuk opini publik menjelang dimulainya konflik. Namun demikian, penelitian ini tidak mengaitkan dinamika propaganda tersebut dengan kerangka psikologis pengambil keputusan utama, khususnya bagaimana pandangan dunia, sistem kepercayaan, dan emosi politik Vladimir Putin memengaruhi strategi komunikasi politik dan pembenaran invasi.

Berdasarkan keterbatasan penelitian-penelitian tersebut, masih terdapat kekosongan kajian yang mengintegrasikan analisis psikologis individu pemimpin dengan dinamika kebijakan invasi Rusia terhadap Ukraina secara longitudinal sejak ia menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1999. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut melalui pendekatan psikopolitik untuk memahami bagaimana karakter, sistem kepercayaan, emosi, dan pola kognitif Vladimir Putin membentuk arah kebijakan luar negeri Rusia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Mengapa Rusia di bawah kepemimpinan Putin melakukan kebijakan agresif terhadap Ukraina sejak tahun 2004 hingga 2025?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan akademik demi mendapatkan gelar sarjana pada hubungan internasional di Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur. Penelitian ini juga ditujukan untuk mengukur kemampuan mahasiswa untuk melimpahkan kontribusinya selama masa studi pada ranah disiplin ilmu hubungan internasional.

1.3.2 Secara Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keterkaitan struktur kepribadian Vladimir Putin selama masa kepresidenannya, dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan pada topik invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2004-2025 menggunakan pendekatan psikopolitik.

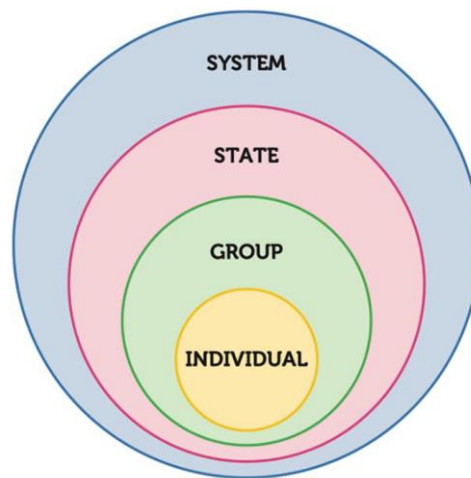
1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Level Of Analysis (LOA) Individu

Dalam ranah disiplin ilmu hubungan internasional, arah kebijakan luar negeri suatu negara adalah tidak selalu terletak pada konsep abstrak “negara” sebagai aktor tunggal, melainkan pada keputusan dan tindakan manusia yang memegang kuasa. Teori Hubungan Internasional tradisional seringkali “mengabaikan” negara, memperlakukannya sebagai entitas rasional dan

mengabaikan kompleksitas agen individu dan kelompok. Teori analisis kebijakan luar negeri telah banyak menantang hal ini dengan menekankan bahasan yang berfokus pada aktor, yang mengembalikan perhatian pada pembuat keputusan manusia dan keyakinan, persepsi, serta interaksi mereka. Dengan demikian, pentingnya menyoroti agen, kreativitas, pertanggungjawaban, dan variabilitas dalam hasil kebijakan luar negeri, memberikan penjelasan yang lebih kaya daripada model yang berpusat pada negara, serta menjembatani berbagai tingkat analisis—dari individu dan kelompok hingga politik domestik dan sistem internasional (Hudson, 2005).

Gambar 1.1 *Level Of Analysis in International Relations*



Sumber: (Gebhard, 2022)

Untuk menganalisis tindakan suatu negara, para cendekiawan seringkali mengaitkan dengan beberapa tahapan analisis, yakni *system*, *state*, *group*, dan *individual*. Pada tingkat sistem menganalisis lanskap global termasuk distribusi kekuasaan, hukum internasional, dan teknologi, serta bagaimana struktur-struktur

ini membentuk kondisi bagi semua aktor lainnya. Pada tingkat negara, fokusnya seringkali pada posisi strategis dan karakteristik internal negara-negara, sementara tingkat kelompok menganalisis bagaimana konteks birokrasi dan sosial, seperti LSM atau partai politik, mempengaruhi perilaku kolektif. Terakhir, tingkat individu meneliti dimensi pribadi, mengeksplorasi bagaimana keyakinan dan kepribadian spesifik para pengambil keputusan memengaruhi peristiwa global (McGlichey, 2022).

Ketika kerangka kerja tingkat analisis dalam Hubungan Internasional menekankan perspektif sistem, negara, kelompok dan individu untuk menjelaskan politik global, Hudson (2005) menambahkan sudut pandang yang lebih berpusat pada aktor. Alih-alih memperlakukan negara sebagai aktor tunggal atau hanya fokus pada tekanan sistemik, Hudson menyoroti aktor-aktor yang beragam dan proses pengambilan keputusan yang membentuk hasil kebijakan luar negeri. Hal ini termasuk lembaga pemerintah (kementerian, legislatif, birokrasi), pemimpin dan penasihat dengan keyakinan dan gaya pribadi mereka, serta pengaruh sosial seperti kelompok kepentingan, media, dan opini publik. Dengan demikian, untuk menggali lebih dalam dinamika internal negara, kebijakan luar negeri harus dipahami bahwa hal itu bukanlah sekadar hasil dari batasan sistemik atau kepentingan negara yang abstrak, melainkan hasil interaksi kompleks antara aktor di berbagai tingkatan (Hudson, 2005).

Berdasarkan kerangka *Level of Analysis*, penelitian ini secara spesifik memfokuskan analisis pada tingkat individu, dengan menempatkan Vladimir Putin sebagai unit analisis utama. Hal ini didasarkan pada karakteristik sistem politik

Rusia yang bersifat sentralistik dan personalistik, di mana keputusan strategis, termasuk kebijakan militer dan luar negeri, sangat bergantung pada preferensi, persepsi, serta gaya kepemimpinan presiden. Dengan demikian, pendekatan level individu dianggap paling relevan untuk menjelaskan dinamika pengambilan keputusan invasi Rusia terhadap Ukraina.

1.4.2 Teori Psikopolitik

Psikologi politik merupakan bidang kajian interdisipliner yang menggabungkan ilmu politik dan psikologi. Fokus utamanya terletak pada bagaimana aspek kognitif, emosional, dan perilaku manusia berperan dalam dinamika politik. Pendekatan ini menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu keterikatan emosional individu terhadap partai politik, pandangan terhadap isu-isu tertentu, serta persepsi terhadap figur atau kandidat politik (Haluana'a dkk., 2020). Psikologi politik ini memberikan landasan untuk memahami berbagai dinamika dalam perilaku politik individu maupun kelompok. Melalui pendekatan psikologis, kita dapat menjelaskan faktor-faktor kognitif, emosional, dan sosial yang memengaruhi tindakan politik. Psikologi politik berkaitan dengan upaya menjelaskan perilaku manusia dalam ranah politik dengan memanfaatkan konsep-konsep dari psikologi. Konsep-konsep tersebut kemudian disesuaikan agar dapat diterapkan secara relevan dalam konteks politik. Selanjutnya, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai persoalan atau isu politik yang berkembang (Auza, 2022)

Psikopolitik juga memandang kepercayaan politik sebagai konstruksi psikologis yang mencerminkan keyakinan warga negara terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola kepentingan publik melalui kebijakan dan regulasi.

Adinugroho (2021) mengemukakan empat dimensi utama yang membentuk kepercayaan politik: (1) dimensi budaya, yang terkait dengan keragaman nilai etnik dan agama dari lebih dari 200 suku bangsa; (2) dimensi gender, yang mencerminkan persepsi peran sosial serta pandangan antara laki-laki dan perempuan dalam ranah politik; (3) dimensi preferensi subjektif yakni afeksi emosional individu terhadap figur politik tertentu; dan (4) dimensi kinerja, berupa penilaian masyarakat terhadap efektivitas kerja pemerintah. Pendekatan non empiris ini memberikan landasan psikologis dan kultural dalam memahami konstruksi legitimasi politik suatu negara.

Menurut Foucault (1977), psikopolitik dihasilkan dari kekuasaan psikiatri yang mengubah krisis menjadi alat politik dengan memanipulasinya daripada sekadar mengamatinya, sehingga mengubah tindakan kekuasaan menjadi bentuk-bentuk pengetahuan. Berbeda dengan biopolitik, yang mengendalikan populasi melalui proses biologis, psikopolitik beroperasi melalui subjektivitas, membentuk cara individu memandang realitas dan kebenaran dengan menciptakan krisis yang melegitimasi otoritas. Genealogi ini menunjukkan bahwa manipulasi krisis oleh psikiatri telah mengantisipasi tata kelola modern, di mana krisis terus-menerus digunakan untuk membenarkan intervensi di bidang-bidang seperti keuangan, migrasi, atau demokrasi. Foucault menekankan bahwa psikopolitik bersifat rapuh dan kondisional, karena efektivitasnya bergantung pada kerja sama pasien dan tetap rentan terhadap perlawanan, berbeda dengan narasi kontemporer yang menggambarkannya sebagai totaliter. Dengan demikian, psikopolitik mengungkapkan baik kekuatan produktif krisis dalam tata kelola maupun ketidakstabilannya yang inheren, membuka ruang bagi ketidakpastian dan kontra-kekuasaan dalam kehidupan politik. Pada dasarnya, kepemimpinan psikopolitik

berfokus pada pengendalian pikiran dan subjektivitas melalui krisis, pengakuan, dan pengelolaan ketidakpastian, menjadikan tata kelola krisis sebagai teknik sentral kekuasaan modern. Secara esensial, karakteristik kepemimpinan yang sejalan dengan psikopolitik bersifat berorientasi pada krisis, manipulatif, dan secara psikologis mengarahkan, lebih fokus pada pemeliharaan keadaan darurat yang berkelanjutan daripada pemecahan masalah, demi mempertahankan pengaruh mereka (Prozorov, 2020).

1.4.3 Teori Kepemimpinan Politik

Menurut Siregar, H. S. & Budi, P. (2025) kepemimpinan merupakan suatu proses sosial yang bersifat dinamis, yakni ketika seorang individu mempengaruhi anggota lainnya untuk bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini menekankan pentingnya interaksi antar individu, kemampuan untuk memberikan arahan, membangun komitmen, serta menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Sejak awal abad ke-20, berbagai teori kepemimpinan terus berkembang. Teori Trait menyoroti bahwa kepemimpinan berasal dari sifat bawaan seperti keberanian, integritas, dan rasa percaya diri. Teori Perilaku mengarahkan fokus pada tindakan pemimpin yang efektif, termasuk perhatian terhadap tugas serta hubungan interpersonal. Teori Kontingensi memperkenalkan pentingnya kesesuaian antara gaya kepemimpinan dengan situasi tertentu. Kemudian, Teori Transformasional menekankan peran pemimpin dalam menginspirasi pengikutnya untuk mencapai perubahan besar melalui visi dan motivasi. Teori Kepemimpinan Autentik menyoroti pentingnya keaslian, nilai moral, dan keselarasan antara prinsip pribadi dengan tindakan kepemimpinan.

Kepemimpinan politik merupakan peran kepemimpinan yang dijalankan baik di ranah suprastruktur politik seperti lembaga pemerintahan, maupun di infrastruktur politik seperti partai politik dan organisasi masyarakat. Kepemimpinan politik dapat dilihat dari tiga perspektif utama: sebagai pola perilaku, sebagai karakteristik individu, dan sebagai nilai politik. Dalam dua perspektif pertama, kepemimpinan sangat berkaitan dengan kemampuan untuk membujuk dan mengarahkan orang lain guna mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin politik dituntut untuk dapat mempertahankan dukungan konstituen, membangun komunikasi yang efektif, serta memotivasi dan mengelola lingkungan politiknya secara optimal (Kustiawan dkk., 2022). Kepemimpinan politik sebagai fondasi utama bagi jalannya organisasi politik dan pemerintahan dalam meraih tujuan yang telah ditetapkan. Di era masyarakat modern, ekspektasi terhadap pemimpin politik pun semakin tinggi, mencakup tidak hanya kapasitas kepemimpinan yang mumpuni, tetapi juga integritas moral serta dedikasi yang kuat terhadap kepentingan publik (Nazril dkk., 2024).

Dalam penelitian Sobari (2022) berbagai teori kepemimpinan politik telah menghasilkan tiga pendekatan utama dalam menjelaskan bagaimana kepemimpinan bekerja dan memberikan dampak dalam konteks politik. Pendekatan pertama meliputi peran individu pemimpin yang melihat bahwa karakteristik personal dan kapasitas kepemimpinan menjadi faktor utama dalam menentukan efektivitas kepemimpinan politik. Pendekatan kedua menganggap bahwa kepemimpinan politik dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar diri pemimpin, seperti struktur sosial, budaya politik, dan sistem kelembagaan. Sedangkan pendekatan ketiga menggabungkan keduanya dengan menekankan bahwa

kepemimpinan politik merupakan hasil interaksi antara karakter individu pemimpin dan konteks lingkungan tempat ia memimpin. Elgie (2016) dan Sobari (2022) mengembangkan tiga cabang dalam paradigma ini. Pertama, teori politik normatif yang menuntut pemimpin mampu menyeimbangkan antara prinsip demokratis dan efektivitas; kedua, pendekatan perilaku kepemimpinan yang fokus pada tindakan dan gaya kepemimpinan; ketiga, hasil kepemimpinan yang merupakan konsekuensi dari interaksi antara kualitas pribadi pemimpin dan kondisi eksternal yang dihadapinya.

1.4.4 Analisis Kebijakan Luar Negeri

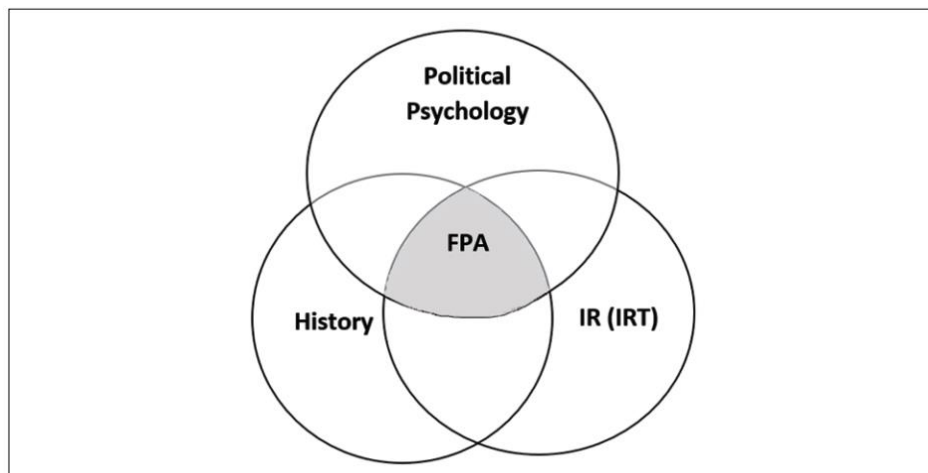
Analisis Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy Analysis*) adalah subbidang hubungan internasional yang berfokus pada tingkat analisis yang spesifik terhadap aktor, menekankan peran pemimpin dan pembuat keputusan dalam membentuk kebijakan luar negeri. Berbeda dengan teori-teori hubungan internasional tradisional yang sering memperlakukan negara sebagai aktor tunggal dan memprioritaskan struktur sistemik seperti keseimbangan kekuatan atau institusi, FPA menegaskan bahwa pembuat keputusan manusia adalah dasar dari hubungan internasional. Ia menyoroti bahwa perilaku negara tidak dapat sepenuhnya dipahami tanpa menganalisis bagaimana pemimpin memandang situasi, menafsirkan ancaman, dan membuat pilihan.

FPA didasarkan pada beberapa asumsi kunci: pemimpin penting, sifat pribadi dan gaya kognitif mereka memengaruhi hasil kebijakan luar negeri, dan rasionalitas manusia dibatasi oleh batas-batas psikologis dan bias. Asal-usulnya terletak pada profiling psikologis pemimpin selama Perang Dunia II, dan hingga

kini terus memberikan wawasan tentang bagaimana pemerintah memprediksi tindakan kebijakan luar negeri saat ini (Breuning, 2022). Politik luar negeri didasarkan pada pilihan, persepsi, dan tindakan individu atau kelompok yang memiliki wewenang sah untuk mengambil keputusan mengikat yang mempengaruhi entitas asing. Perspektif ini menekankan bahwa hubungan internasional pada akhirnya berakar pada kognisi, kreativitas, dan pertanggungjawaban manusia, menjadikan kebijakan luar negeri sebagai hasil dari proses multifaktorial dan interdisipliner yang dibentuk oleh manusia nyata dibandingkan model negara abstrak (Hudson, 2005).

Gambar 1.2 Persimpangan antara Analisis Kebijakan Publik dengan Tiga Teori

Ilmu Sosial



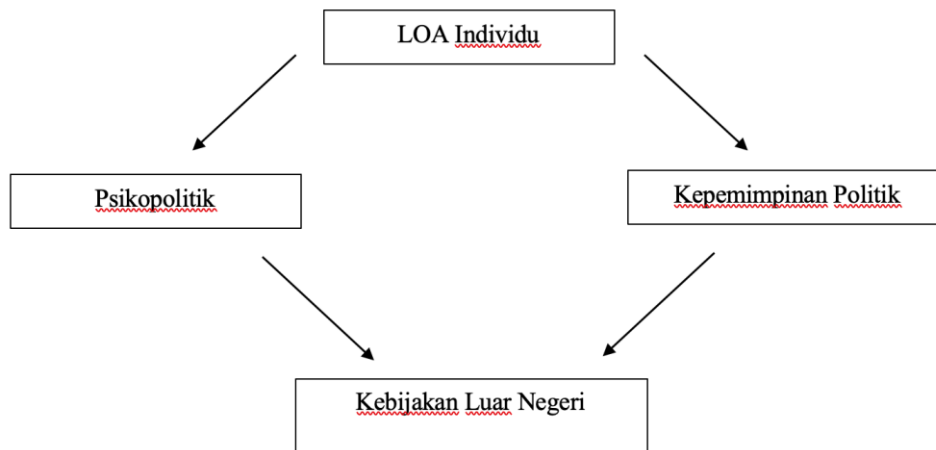
Sumber: (Lynamata, 2016)

Analisis Kebijakan Luar Negeri (FPA) sebagai bidang yang tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus dilihat melalui perpotongannya dengan tiga ilmu sosial utama: Sejarah, Psikologi Politik, dan Hubungan Internasional (IR). Dalam pandangan ini, FPA berada di pusat disiplin-disiplin tersebut, meminjam alat

dan perspektif mereka untuk menjelaskan bagaimana keputusan kebijakan luar negeri dibuat. Dari Sejarah, FPA memperoleh kedalaman konteks, urutan krisis, dan pentingnya warisan dalam membentuk pilihan. Dari Psikologi Politik, FPA memasukkan peran kepribadian pemimpin, bias kognitif, dan respons stres, menunjukkan bagaimana psikologi individu dapat mendominasi hasil kebijakan luar negeri, terutama di negara-negara kecil atau non-demokratis. Dari IR, FPA menempatkan keputusan dalam tekanan sistemik seperti aliansi, blok ideologis, dan struktur geopolitik, menghubungkan pengambilan keputusan tingkat mikro dengan teori tingkat makro. Dengan menekankan persimpangan ini, penulis menggambarkan FPA sebagai kerangka kerja multidisiplin dan berpusat pada aktor yang berkembang di persimpangan konteks historis, wawasan psikologis, dan teori sistemik. Hal ini menjadikan FPA sangat berharga untuk menganalisis kepemimpinan dalam perang, di mana warisan historis, psikopolitik pemimpin, dan batasan internasional bersatu untuk membentuk hasil kebijakan luar negeri.

1.5 Sintesa Pemikiran

Bagan 1.1 Sintesa Pemikiran



Berdasarkan teori yang telah penulis uraikan, penulis akan menjelaskan bagaimana proses pengambilan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh beberapa tahap. Pada tahap pertama, *Level of Analysis* (LOA) Individu menjelaskan bagaimana tindakan, keyakinan, dan karakteristik individu manusia dalam kaitannya dengan peristiwa dan keputusan internasional. Perspektif ini menekankan dampak motivasi pribadi, persepsi, dan faktor psikologis terhadap perilaku negara dan interaksi global, serta menyoroti bagaimana pemimpin dan tokoh berpengaruh membentuk kebijakan luar negeri.

Selanjutnya, teori psikopolitik akan menjelaskan bagaimana pemimpin bukanlah aktor rasional sepenuhnya mereka dipengaruhi oleh emosi, persepsi, nilai-nilai pribadi, pengalaman masa lalu, dan struktur kepribadian. Terakhir, teori kepemimpinan politik akan digunakan untuk menganalisis pola perilaku, sebagai karakteristik individu, dan sebagai nilai politik.

Pendekatan ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana kebijakan luar negeri adalah suatu hasil interaksi antara kepribadian pemimpin, konteks institusional, dan dinamika sistem internasional. Sementara itu, kebijakan luar negeri sendiri juga merupakan gabungan dari sejarah, psikologi politik, dan dinamika hubungan internasional suatu pemimpin itu sendiri.

1.6 Argumen Utama

Penelitian ini menegaskan bahwa agresi Rusia terhadap Ukraina tidak hanya sangat dipengaruhi oleh faktor individu Vladimir Putin sebagai pemegang otoritas tertinggi. Faktor individual tersebut dianalisis melalui dua dimensi utama. Pertama, dimensi psikopolitik yang mencakup pengalaman traumatis, memori kolektif, serta orientasi nostalgia terhadap kejayaan Rusia atau Uni Soviet yang membentuk persepsi Putin terhadap Ukraina sebagai bagian dari ruang historis Rusia. Hal tersebut dibentuk oleh latar belakang pribadi Putin yang tumbuh dengan kondisi pasca Perang Dunia II ketika banyak orang mati kelaparan, kehilangan anggota keluarga terdekat, kesulitan ekonomi serta kondisi keluarga yang tidak harmonis. Kedua, dimensi kepemimpinan yang tercermin dalam pola kepemimpinan yang terpusat, otoriter, dan personalistik, sehingga preferensi dan keyakinan pribadi pemimpin memiliki pengaruh dominan termanifestasi dalam dalam perumusan kebijakan luar negeri Rusia yang berani mengambil risiko dan cenderung agresif, sebagaimana terlihat dalam penggunaan kekuatan militer dan instrumen paksaan untuk mencapai tujuan politik. Rasa curiga dan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap aktor-aktor Barat mendorong kebijakan konfrontatif terhadap NATO dan Uni Eropa, sekaligus memperkuat postur defensif Rusia. Pada saat yang sama, keyakinan nasionalis mengenai takdir historis Rusia menopang ambisi ekspansionis

serta upaya mempertahankan status sebagai kekuatan besar. Dengan demikian, tindakan agresif Rusia terhadap Ukraina dapat dipahami sebagai manifestasi dari konstruksi psikologis dan karakter kepemimpinan Putin yang membentuk proses pengambilan keputusan strategis negara.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Penelitian ini adalah penelitian yang menganalisis hubungan sebab-akibat dari suatu fenomena sosial. Jenis penelitian ini menekankan pada studi suatu situasi atau masalah guna menjelaskan pola hubungan antara variabel (Neuman, W. L. (2020). Model eksplanatif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan “mengapa” hal-hal terjadi daripada hanya menggambarkan bagaimana hal-hal tersebut terlihat (Babbie, E.R., 2021).

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian berikut mencari tahu lebih lanjut mengenai arah kebijakan luar negeri Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin sejak tahun 2004 hingga tahun 2025. Penelitian ini menganalisis hasil kebijakan luar negeri Presiden Vladimir Putin dalam konteks invasi Rusia ke Ukraina melalui sejarah individu, politik, analisis perilaku, cara kepemimpinan dan psikopolitik.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini merupakan teknik sistematis, eksplisit, dan dapat direproduksi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis kumpulan karya yang telah

selesai dan tercatat yang dihasilkan oleh peneliti, akademisi, dan praktisi Booth et al. (2021). Penelitian ini mengkaji berbagai sumber primer dan sekunder terkait kepribadian Vladimir Putin, dinamika politik luar negeri Rusia, proses pengambilan kebijakan, serta teori-teori psikopolitik. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik dokumentasi pidato resmi, wawancara, dan kebijakan Kremlin, serta kajian literatur dari jurnal akademik dan laporan lembaga riset internasional (*think-tank*), yang kemudian diperkuat dengan sumber sejarah seperti biografi politik Putin dan analisis pakar mengenai dinamika hubungan Rusia–Ukraina guna menjamin kredibilitas serta relevansi analisis psikopolitik yang mendalam.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif menggunakan acuan Miles dan Huberman. Pendekatan analisis kualitatif ini bersifat interaktif dan berkelanjutan, di mana peneliti melakukan proses pengolahan data secara simultan melalui tiga alur kegiatan utama, yaitu reduksi data untuk menyederhanakan informasi mentah, penyajian data dalam bentuk matriks atau narasi guna melihat pola hubungan, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi untuk memaknai data secara mendalam sejak awal penelitian hingga laporan akhir disusun (Miles & Huberman, 1994).

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I penulis menjabarkan pengantar penelitian secara umum, yang mencakup dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sistematika pemikiran, argumen utama, dan metode penelitian yang

terdiri dari tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II penulis membahas lebih lanjut mengenai sejarah personal Vladimir Putin menggunakan *Level of Analysis (LOA)* individu berdasarkan faktor psikopolitik dan kepemimpinan politik.

BAB III berisi tentang hasil kebijakan luar negeri oleh Vladimir Putin berdasarkan faktor psikopolitik dan kepemimpinan politik, serta bagaimana kedua aspek tersebut mempengaruhi arah kebijakan Vladimir Putin dalam konflik Rusia-Ukraina.

BAB IV adalah penutup dari penelitian ini, berupa kesimpulan dan saran dari topik yang telah dibahas.